

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DI SMP NEGERI 5 TEUPAH SELATAN

Siti Afrina^{1*}, Fadli Afriandi²

^{1,2} Universitas Teuku Umar

*Korespondensi : fadliafriandi@utu.ac.id

ABSTRAK

Ketersediaan sarana dan prasarana adalah komponen krusial dalam mendukung keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka. Di SMP Negeri 5 Teupah Selatan, keterbatasan fasilitas menjadi kendala utama dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pembelajaran yang kontekstual dan berfokus pada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 5 Teupah Selatan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk analisis data, penelitian ini merujuk pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang mencakup empat aspek penting: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil temuan mengungkap pelaksanaan Kurikulum Merdeka belum mencapai tingkat optimal, yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga pendidik yang memahami substansi kurikulum, minimnya fasilitas pendukung pembelajaran seperti ruang praktik dan media digital, serta keterbatasan alokasi anggaran dari pemerintah. Meskipun komunikasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan berjalan baik, belum adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) internal turut mencerminkan lemahnya struktur birokrasi sekolah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas guru, dan dilengkapi dengan fasilitas serta infrastruktur yang memadai demi mendukung keberhasilan implementasi kurikulum secara menyeluruh.

Kata Kunci : Implementasi, Kurikulum Merdeka, Pendidikan.

ABSTRACT

Adequate facilities and infrastructure are essential for the successful implementation of the Merdeka Curriculum. At SMP Negeri 5 Teupah Selatan, limited resources hinder efforts to realize contextual and student-centered learning. This study aims to analyze the curriculum's implementation in improving education quality. A descriptive qualitative method was employed, utilizing observation, interviews, and document analysis for data collection. The analysis was guided by George C. Edward III's theory of policy implementation, which includes the components of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation has yet to reach an optimal level. This is due to a lack of teachers who fully understand the curriculum content, insufficient learning facilities such as practice rooms and digital media, and limited budget allocation from the government. Although communication between the school and the Education Office is relatively effective, the absence of internal Standard Operating Procedures (SOP) reflects weaknesses in the school's bureaucratic structure. The study recommends strengthening policy support, improving teacher

capacity, and ensuring the availability of adequate facilities and infrastructure to support the comprehensive implementation of the curriculum.

Keywords : *Implementation, Independent Curriculum, Education*

A. PENDAHULUAN

Transformasi pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan, terutama dengan adanya kurikulum merdeka sebagai respon terhadap dinamika global, perkembangan teknologi, dan evaluasi terhadap kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan potensi peserta didik. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang berbasis proyek serta penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta otonomi bagi guru dalam menentukan perangkat ajar (Kemendikbudristek BSKAP, 2022). Implementasi kurikulum ini adalah kesenjangan antara rancangan ideal dengan kondisi nyata di lapangan, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Fenomena penting yang merefleksikan tantangan tersebut dapat ditemukan di SMP Negeri 5 Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue. Meskipun sekolah ini telah melaksanakan kurikulum merdeka melalui jalur mandiri sejak tahun ajaran 2023/2024, pelaksanaannya masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pemahaman guru terhadap paradigma baru pembelajaran.

Dalam konteks kebijakan publik, pelaksanaan kurikulum merupakan bentuk implementasi kebijakan pendidikan yang harus dievaluasi efektivitasnya. George C. Edward III menyatakan bahwa

keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi implementasi kurikulum merdeka, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis seperti Simeulue.

Studi ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana penerapan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 5 Teupah Selatan dengan meninjau sejauh mana kurikulum dijalankan sesuai pedoman, kendala-kendala yang dihadapi, dan strategi adaptasi yang dilakukan pihak sekolah. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menyajikan gambaran jelas dan faktual mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan yang inklusif dan kontekstual, serta menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan dukungan yang tepat bagi sekolah-sekolah di wilayah serupa.

Penelitian dengan judul “Analisis Hambatan Guru Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar” Mengatakan bahwa salah satu hambatan dalam penerapan Kurikulum Merdeka adalah minimnya inovasi dalam kegiatan pembelajaran serta kesulitan dalam pengelolaan kelas, yang disebabkan oleh ketidakjelasan bentuk penilaian pada tahap diagnostik awal (Rosa, 2023). Selanjutnya, kajian yang telah dilakukan dengan judul “Problematisasi Implementasi Kurikulum

Merdeka Di SMP Negeri 5 Padang Panjang” menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, disebabkan oleh kurang optimalnya bimbingan dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah (Susanti et al., 2023). Dari kedua penelitian tersebut penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka di SMP Bina Taruna Kabupaten Bandung” memiliki pendapat yang berbeda. Riset ini menemukan bahwa hambatan utama pelaksanaan Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya berjalan lancar karena kurangnya pemahaman oleh guru, peserta didik, dan wali murid terkait isi dan tujuan kurikulum ini, yang mengakibatkan terhambatnya tujuan pelaksanaan kurikulum merdeka (Miladiah et al., 2023).

Terdapat sejumlah kesamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun persamaannya yaitu penelitian ini dan studi sebelumnya sama-sama membahas sejauh mana kebijakan kurikulum baru tersebut dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat sekolah. Selain itu, kesamaan juga terlihat pada pengamatan terhadap berbagai kendala yang muncul selama proses implementasi, seperti terbatasnya pemahaman pendidik, keterbatasan pelatihan, serta tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Meski demikian, terdapat sejumlah perbedaan, salah satunya berkaitan dengan pendekatan yang digunakan dalam analisis yang tidak hanya mendeskripsikan hambatan secara umum, melainkan juga mengevaluasi efektivitas implementasi kurikulum berdasarkan indikator-indikator tertentu seperti komunikasi internal, kesiapan

sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan kebijakan di tingkat sekolah.

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode analisis kualitatif untuk mendeskripsikan secara jelas bagaimana proses pengumpulan data. Pendekatan penelitian kualitatif berlandaskan pada filosofi *postpositivisme* sebagai pemahaman objek kajian dalam konteks atau situasi alaminya tanpa manipulasi seperti pada eksperimen, di mana peneliti menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Alasan peneliti mengambil metode ini karena dianggap mampu dalam menjawab permasalahan dari penelitian yang dilakukan. Objek penelitian dilakukan di SMP Negeri 5 Teupah Selatan yang terletak di wilayah administrasi Kabupaten Simeulue. Tepatnya peneliti memilih objek penelitian tersebut dikarenakan saat ini objek kajian peneliti adalah salah satu pelaksana dari kurikulum Merdeka yang masih dinilai belum dapat memenuhi standar pelaksanaan kurikulum merdeka.

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis, yaitu data primer yang berasal langsung dari sumber utama atau data asli. Data diambil dari sesuai dengan keadaan kebenaran yang dapat menggambarkan secara akurat dari fenomena permasalahan yang diangkat (Pramiyati et al., 2017). Data sekunder diperoleh dari data selain dari data primer yang diperoleh, yaitu data dapat diperoleh dari jurnal, buku, atau media lainnya (Mokola et al., 2015). Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui *purposive sampling*, penelitian ini menentukan informan yang paling representatif dan memahami topik yang

diteliti diantaranya adalah staf kurikulum dan kesiswaan SMP Kabupaten Simeulue, kepala Sekolah, guru, dan siswa/i.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini dilakukan untuk mendalami penerapan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 5 Teupah Selatan dengan mengacu pada Model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III mencakup empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan data dari observasi dan wawancara dengan beragam informan, diperoleh sejumlah temuan yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

1. Komunikasi

Edward mengungkapkan bahwa lemahnya komunikasi disebabkan karena keakuratan informasi serta kejelasan isi informasi mengenai kebijakan yang tidak jelas antara pelaku kebijakan kepada pelaksana kebijakan tidak memberikan kekeliruan dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, komunikasi sangat penting untuk berbagai hal, seperti digunakan agar interaksi antar manusia dapat terjalin secara efektif dan berjalan dengan lancar (Wisman, 2017). Komunikasi mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 5 sendiri menunjukkan bahwa hubungan antara Dinas Pendidikan Simeulue dan pihak sekolah telah berjalan dengan semestinya.

Kepala sekolah SMP Negeri 5 Teupah menyampaikan terkait dengan komunikasi dinas pendidikan dengan pihak sekolah khususnya mengenai kurikulum merdeka saya rasa sudah cukup baik disampaikan dan disosialisasikan oleh pihak dinas Pendidikan” (Wawancara, 18 Desember 2024). Guru dan kepala sekolah

mengakui bahwa mereka menerima informasi yang cukup jelas mengenai tujuan serta cara pelaksanaan kurikulum merdeka. Selain itu, dinas juga menyediakan ruang diskusi bagi guru dan siswa untuk menyampaikan pertanyaan serta umpan balik. Meski begitu, masih ditemukan keterbatasan dalam pendalaman materi oleh sebagian guru, terutama dalam menerjemahkan prinsip kurikulum ke dalam kegiatan pembelajaran konkret.



Gambar 1 Surat Komunikasi Dinas Pendidikan dan Sekolah

Komunikasi sendiri dinilai efektif ketika transmisi, kejelasan dan konsistensi berjalan dengan baik. Dalam hal transmisi mengenai implementasi kurikulum merdeka, pihak dinas menyampaikan informasi kepada pihak sekolah melalui sosialisasi, pelatihan dan kunjungan lapangan ke setiap sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui surat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menggunakan email sebagai media penyampaian informasi dan berpendapat bahwa proses transmisi yang efektif memerlukan media dan metode yang tepat agar informasi dapat diterima dengan akurat dan jelas (Fredriansyah, 2023). Sama halnya pada bagian kejelasan informasi yang disampaikan dianggap sudah jelas oleh pihak sekolah karena telah mendapatkan pemahaman dari sosialisasi

serta pelatihan mulai dari pengenalan prinsip dasar kurikulum merdeka, pembelajaran hingga penyusunan modul ajar dan pengelolaan perangkat pembelajaran. Komunikasi yang jelas diperlukan untuk mencapai sasaran kebijakan pendidikan secara efektif (Nani, 2021). Pernyataan ini juga sesuai dengan pendapat Syani yang mengatakan bahwa komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan sangat krusial untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan (Syani, 2018).

Komunikasi antara dinas pendidikan dan sekolah juga telah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan setiap kali satu kali per semester. Dinas juga aktif berinteraksi dengan siswa dan guru, memberikan ruang untuk bertanya dan berdiskusi agar penerapan kurikulum merdeka dapat berlangsung secara optimal.

2. Sumber daya

Setelah sebuah kebijakan telah disampaikan dengan baik, sumber daya juga pasti terlibat dalam jalannya sebuah kebijakan. Empat komponen yang termasuk dalam sumber daya meliputi ketersediaan staf yang memadai baik dari segi jumlah maupun mutu, informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, kewenangan untuk menjalankan tugas serta kewajiban dengan didukung oleh fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Dari sisi sumber daya, pelaksanaan kurikulum masih menghadapi tantangan yang cukup besar sehingga pelaksanaan kurikulum merdeka terhambat dikarenakan kurangnya beberapa aspek sumber daya. Terdapat empat komponen utama yang membentuk sumber daya, yaitu tenaga kerja yang cukup dan berkualitas dari segi jumlah maupun kualitas, serta informasi

yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, kewenangan (*authority*) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pada aspek sumber daya manusia sekolah mengalami kekurangan tenaga pendidik sehingga pembagian tugas belum maksimal. Data menunjukkan jumlah guru dan tenaga administrasi masih belum seimbang dengan jumlah siswa. Manusia selalu memiliki peran utama dalam setiap kegiatan organisasi, karena mereka berperan sebagai perencana serta penggerak dalam menjalankan berbagai aktivitas yang ada (Mulyadi, 2019). Seluruh aktivitas organisasi dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada individu yang menjalankannya, sehingga pengelolaan karyawan secara efektif menjadi hal yang penting untuk mencapai tujuan yang ditentukan (Husaini, 2020).

Di samping itu, dari segi sumber daya anggaran yang diterima sekolah melalui program BOS jauh di bawah jumlah seharusnya berdasarkan jumlah peserta didik, yang berdampak pada minimnya ketersediaan alat dan ruang pendukung pembelajaran. Hal ini sejalan penelitian riset yang menunjukkan bahwa kurangnya anggaran pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang menghambat penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran modern, dan menyebabkan sekolah kesulitan menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai (Mulkan, 2024). Hal tersebut akhirnya berdampak pada sumber daya peralatan yang mempengaruhi efektivitas implementasi kurikulum. Fasilitas seperti laboratorium, komputer, serta perlengkapan seni budaya berbasis proyek belum tersedia secara memadai, sehingga

kegiatan praktik sulit terlaksana secara optimal.

No	Peralatan	Jumlah
1	Komputer	10 Unit
2	Miskroskop	3 Unit

Tabel 1 Persediaan Peralatan Sekolah

Tabel di atas menunjukkan jumlah dan jenis peralatan yang dimiliki oleh sekolah hanya terdiri dari 10-unit komputer dan 3-unit mikroskop, sementara sekolah juga menjalankan program seni dalam kurikulum merdeka tapi peralatannya sama sekali belum ada.

Salah satu guru SMP Negeri 5 Teupah Selatan mengatakan bahwa fasilitas di sekolah memang sudah ada, tapi menurut saya masih perlu ditambah. Keterbatasan fasilitas yang ada disekolah juga menjadi kesulitan bagi kami siswa untuk mempelajari pembelajaran lebih mendalam. Jika ada matapelajaran yang harusnya disertai dengan praktik terkadang itu tidak terlaksana karena terbatasnya fasilitas sekolah (Wawancara, 18 Desember 2024).

Anggaran di SMP Negeri 5 Teupah Selatan belum sepenuhnya mendukung penerapan kurikulum merdeka, karena masih dianggap kurang dari dana yang harusnya diterima. Selain itu, dana yang ada tidak sepenuhnya difokuskan untuk kurikulum merdeka namun dibagi lagi dengan kebutuhan sekolah lainnya.

3. Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai keinginan dari orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu kebijakan dengan baik agar tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai. Disposisi memiliki pengaruh penting terhadap efektivitas

implementasi sebuah program, disposisi juga menentukan seberapa penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan termasuk komitmen dari pelaksana (Subekti et al., 2017).

Dalam hal disposisi atau sikap pelaksana di SMP Negeri 5, guru dan kepala sekolah pada dasarnya menunjukkan antusiasme tinggi terhadap penerapan kurikulum merdeka. Semangat untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih kreatif dan fleksibel terlihat dari upaya mereka mengembangkan metode pengajaran yang beragam. Akan tetapi, belum semua guru memiliki pemahaman dan keterampilan yang seimbang dalam menjalankan prinsip-prinsip baru ini. Masih terdapat kesenjangan antara guru muda yang adaptif terhadap perubahan dan guru senior yang cenderung bertahan dengan metode tradisional.

Guru SMP Negeri 5 juga menyampaikan ada beberapa rekan yang masih kesulitan menyesuaikan metode pembelajaran baru. Dalam penerapannya, masih ada berbagai kendala yang menghambat kelancaran proses belajar mengajar. Namun dengan adanya dorongan dari pemerintah yang terus memberikan motivasi dan penghargaan kami para guru tentunya terus berusaha agar kurikulum ini dapat terlaksana dengan maksimal (Wawancara, 18 Desember 2024).



Gambar 2 Sertifikat Diklat Kurikulum Merdeka

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup adanya Standard Operating Procedures (SOP), alur kerja yang teratur, serta pelaksanaan program yang sistematis. Tanpa keberadaan hal-hal tersebut, pencapaian hasil yang memuaskan akan sulit terwujud karena penyelesaian masalah cenderung bersifat sementara dan memerlukan penanganan khusus tanpa adanya pola standar. Adanya struktur birokrasi diharapkan kegiatan dalam sebuah organisasi berjalan dengan tertib dan sesuai aturan.

SOP juga merupakan serangkaian instruksi penting yang didokumentasikan dan digunakan untuk membantu pekerja dalam menjalankan operasi rutin, memastikan konsistensi, efektivitas, dan produktivitas kerja (Kirom, 2024). Dari hasil penelitian SMP Negeri 5 Teupah Selatan belum memiliki *Standard Operating Procedures* (SOP) khusus yang mengatur teknis pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Akibatnya, proses pembelajaran tidak memiliki pedoman yang baku, sehingga penerapan kurikulum bersifat bervariasi antar guru. Meskipun buku panduan dari pemerintah sudah tersedia, adaptasi terhadap kebutuhan dan kondisi lokal sekolah masih sangat minim. Kurangnya fragmentasi tugas dalam birokrasi internal turut memperlemah koordinasi pelaksanaan program-program kurikulum.

Di sisi lain meskipun SMP Negeri 5 belum memiliki struktur birokrasi tertulis guru-guru tetap menjalankan tugas nya sebaik mungkin agar kurikulum dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang dikatakan salah seorang guru SMP Negeri

5 Teupah Selatan bahwa panduan untuk pengembangan kurikulum adanya hanya yang dikeluarkan oleh pusat. Jadi, kami para guru tetap menyesuaikan dengan panduan yang ada dan tetap menjalankan tanggung jawab kami sebagai guru sebagaimana dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh sekolah agar pembelajaran di sekolah ini tetap berjalan maksimal (Wawancara, 18 Desember 2024).



Gambar 3 SK Pembagian Tugas Guru/TU

Meskipun Implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 5 Teupah Selatan tidak memiliki SOP khusus yang dibuat oleh sekolah maupun dinas pendidikan, sekolah tetap menjalankan kurikulum merdeka selaras dengan panduan yang tersedia. Namun demikian, masih terdapat beberapa guru yang sulit untuk memahami cara mengimplemtnasikan kurikulum merdeka agar sesuai panduan yang ada. Meskipun demikian dinas pendidikan terus melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan agar pelaksanaan kurikulum merdeka berjalan optimal.

Seluruh pihak yang terlibat, baik sekolah, guru, maupun dinas pendidikan, telah berperan sesuai tugasnya dalam menjalankan kurikulum merdeka. Guru melaksanakan tugas sesuai dengan SK

pembagian tugas, sementara dinas memberikan bimbingan, evaluasi, dan koordinasi secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, dinas pendidikan, dan pihak sekolah untuk memperkuat dukungan kebijakan, peningkatan fasilitas, serta pelatihan dan pendampingan yang lebih sistematis bagi para guru dan tenaga pendidik.

D. KESIMPULAN

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 5 Teupah Selatan belum berjalan secara optimal. Berbagai hambatan masih ditemukan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya pemahaman guru terhadap pendekatan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum, minimnya alokasi anggaran, serta belum tersedianya pedoman teknis berupa *Standard Operating Procedures* (SOP) khusus. Meskipun komunikasi antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah telah terjalin melalui pelatihan dan sosialisasi, penyebaran informasi belum merata kepada seluruh pelaksana kebijakan, sehingga menimbulkan ketidakterpaduan dalam pelaksanaan kurikulum dan variasi dalam praktik pembelajaran di masing-masing kelas.

Jika ditinjau berdasarkan teori implementasi dari George C. Edward III, dijelaskan bahwa aspek komunikasi telah terlaksana cukup baik melalui hubungan dua arah antara pemangku kebijakan dan pelaksana di sekolah. Namun demikian, pada aspek sumber daya dan struktur birokrasi masih ditemukan kelemahan yang signifikan. Ketersediaan guru, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, belum memadai, dan fasilitas sekolah

belum mendukung sepenuhnya pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, belum adanya SOP internal menyebabkan pelaksanaan kebijakan cenderung bergantung pada interpretasi individu, yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan. Meskipun guru dan kepala sekolah menunjukkan sikap positif terhadap perubahan kurikulum, pendampingan teknis secara berkelanjutan tetap diperlukan agar penerapan Kurikulum Merdeka dapat berlangsung dengan cara yang konsisten, menyeluruh, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didik di lembaga pendidikan tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Fredriansyah. (2023). Komunikasi Data Pada Model Transmisi. *TRIPLE A: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(1), 14–20.
- Kemendikbudristek BSKAP. (2022). Kemendikbudristek BSKAP. In *Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan M* (Issue 021).
- Kirom, A. J. A. (2024). Efektivitas Kinerja Karyawan: Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Deskripsi Pekerjaan PT Kreasiboga Primatama. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Antartika*, 1(3), 97–

102.
<https://doi.org/10.70052/juma.v1i3.467>
- Miladiah, S. S., Sugandi, N., & Sulastini, R. (2023). Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Di Smp Bina Taruna Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(1), 312–318.
<https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.4589>
- Mokola, F. F., Walandouw, A., & Londa, J. W. (2015). Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Bidang Pemasaran Dalam Mempromosikan Pariwisata Di Kabupaten Halmahera Utara (Studi tentang Komunikasi Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) Oleh. *Friska F. Mokola Jefry W Londa*, 3(3).
- Mulkan. (2024). Analisis Implementasi Kurikulum: Faktor Tantangan Dan Solusi Strategis Di Lingkungan Pendidikan. *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 112–120.
<https://doi.org/10.55681/primer.v2i2.324>
- Mulyadi. (2019). Penulis adalah Kasubbag Keuangan pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin. □ 113. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 17 no 31(31), 113–124.
<http://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/19>
- Nani, Y. N. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 231.
<https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.463>
- 63
Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679.
<https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>
- Rosa. (2023). Analisis hambatan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran matematika sekolah dasar. *Ejournal.Unesa.Ac.Id*, 11, 1807–1817.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/54372%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/54372/43227>
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58–71.
<https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923>
- Sugiyono, P. D. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67, 18.
- Susanti, H., Fadriati, F., & B.S, I. A. (2023). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri

- 5 Padang Panjang. *Alsys*, 3(1), 54–65.
<https://doi.org/10.58578/alsys.v3i1.766>
- Syani. (2018). Syani 2018. *Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Ngadiluwih*, jurnalnasional.ump.ac.id.
- Wisman, Y. (2017). Komunikasi Efektif Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Nomosleca*, 3(2), 646–654.
<https://doi.org/10.26905/nomosleca.v3i2.2039>